

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SUNGAI DERAS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

Eti Fatmawati^{1*}

NIM:E1011161013

Dr.H. Martoyo, MA², Joko Triyono, SE, M.Si²

*Email: etifatmawati@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak,
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Proses Perencanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Desa Sungai Deras yaitu rencana pembangunan Desa belum memerhatikan unsur perencanaan pembangunan, belum digunakannya gedung sekolah PAUD, perencanaan pembangunan sekolah PAUD tidak melibatkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan fisik di Desa Sungai Deras. Penelitian ini menggunakan teori Ginanjar (Ngusmanto 2015, 62) menyatakan syarat perencanaan pembangunan yang baik pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok perencanaan yang terdiri dari: 1) Tujuan akhir yang dikehendaki. Tidak meratanya pembangunan desa karena terpusat di Dusun Pendamar. 2) Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Belum meratanya perencanaan RPJMD sehingga adanya anggaran dana yang terbatas. 3) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Kebijakan masih sebatas pada pembangun gedung. 4) Orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya. Rendahnya pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam berkontribusi mendorong berjalannya sekolah PAUD. Disarankan kepada pemerintah Desa Sungai Deras untuk mengoptimalkan dan mengikutsertakan masyarakat dan unsur pemerintah Desa pada musrenbang maupun musdus terutama pada kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan keadaan dan keinginan masyarakat yang ada dan dapat menimbulkan rasa memiliki dan tanggungjawab dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan dan dapat terwujudnya pembangunan sekolah PAUD yang telah direncanakan seperti yang diharapkan.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan, Fisik, Dan Peran Masyarakat

PHYSICAL DEVELOPMENT PLANNING PROCESS IN SUNGAI DERAS
VILLAGE OF TELUK PAKEDAI SUB-DISTRICT OF KUBU RAYA REGENCY

by

Eti Fatmawati ^{1*}

Student Number: E1011161013

Dr.H. Martoyo, MA ² Joko Triyono, SE, M.Si ²

email : etifatmawati@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak,
2. Lecturer of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the Process of Physical Development Planning in Sungai Deras Village of Teluk Pakedai Sub-District of Kubu Raya Regency. The problems of development planning in Sungai Deras Village are among others, the Village development plan has not considered the elements of development planning, the Early Childhood school building has not been used, the Early Childhood school development planning did not involve the community. This study used descriptive research with a qualitative approach is expected to provide a description of the physical development planning process in Sungai Deras Village. This study used the Ginanjar theory (Ngusmanto 2015, 62) which states that the requirements for good development planning in general must have, know and consider several main elements of planning which consist of: 1) The desired final goal. Village development is not evenly distributed because it is centered in Dusun Pendamar. 2) Capital or resources to be used and its allocation. The planning of the RPJMD has not been evenly distributed so there is a limited budget. 3) Policies to implement it. Policy is still limited to building construction. 4) Persons, organizations, or the implementing agency. The lack of knowledge and the active role of the community in contributing to encouraging the operation of Early Childhood school. It is recommended to the Sungai Deras Village Government to optimize and involve the community and village government elements in the the development planning, and discussion at the hamlet level especially in activities to identify problems and needs of the community so that it is expected that the development planning is in accordance with the circumstances and wishes of the existing community and can create a sense of belonging and responsibility from the community to participate in the planning and management of development and the realization of the Early Childhood school construction that has been planned as expected.

Keywords: Development Planning, Physical, and Community Role

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Identifikasi masalah Penelitian.....	2
3. Fokus Penelitian	2
4. Rumusan Masalah.....	3
5. Tujuan Penelitian.....	3
6. Manfaat Penelitian	3

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori.....	4
2. Alur pikir penelitian	7

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	7
2. Lokasi Penelitian	8
3. Subjek dan Objek Penelitian	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Instrument atau Alat Pengumpulan Data	9
6. Teknik Analisis Data	9
7. Teknik Keabsahan Data	9

D. HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Akhir Yang Dikehendaki Dari Pembangunan Sekolah PAUD.....	9
2. Modal Atau Sumber Daya Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan	10
3. Kebijakan-Kebijakan Untuk Melaksanakan Pembangunan Sekolah PAUD	11
4. Orang, Organisasi, Atau Badan Pelaksanaan Pembangunan Sekolah PAUD.....	13

E. PENUTUP

1. Kesimpulan	15
2. Saran	17

F. REFERENSI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, Undang-Undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 3 bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan RPJMD tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan. Disini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Setelah penyusunan RPMJD pemerintah daerah dalam hal ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pihak pendukung lainnya dituntut untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RPJMD tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan penjabaran visi dan misi

Desa yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan Desa. Dokumen RPJM-Desa ini dipandang penting sebagai pedoman Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajua dan kesejahteraan yang lebih baik pada masa lima tahun ke depan.

Desa Sungai Deras terdapat 4 dusun yaitu Dusun Beringin, Dusun Pendamar, Dusun Gunung Ambawang dan Dusun Pinang A. Beberapa faktor tidak meratanya pembangunan yaitu pertama kinerja pemerintahan desa yang kurang memadai hal ini didukung dari kinerja pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan yang tidak tepat disebabkan informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau perencanaan sejak awal yang tidak realistis sehingga tidak dapat terlaksana. Kedua rendahnya tingkat pengetahuan dan peran aktif masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan kehadiran masyarakat saat perencanaan pembangunan atau musrenbang maupun musdus. Ketiga keterbatasan anggaran yang disediakan bagi desa karena dana/anggaran pembangunan yang tersedia terbatas,

sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak.

Perencanaan pembangunan sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras belum sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan, yaitu kurangnya perencanaan pembangunan yang memenuhi unsur pokok perencanaan yang baik dengan faktor pendukung kurangnya peran aktif masyarakat dan belum meratanya perencanaan RPJMD sehingga adanya anggaran dana yang terbatas dari desa yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengelola sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras yang sudah dibangun tersebut. Penelitian ini akan menyampaikan bagaimana perlunya memerhatikan syarat perencanaan pembangunan yang baik pada perencanaan pembangunan gedung sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras menggunakan unsur pokok perencanaan pembangunan melalui alur proses musrenbang di Desa Sungai Deras. Sangat diperlukannya perencanaan dikarenakan gedung sekolah PAUD tersebut belum digunakan sebagaimana mestinya sehingga dalam perencanaan perlu memiliki, mengetahui dan

memperhitungkan beberapa unsur pokok perencanaan.

2. Identifikasi Masalah

Program pembangunan gedung sekolah PAUD di Desa Sungai Deras merupakan program dari musyawarah desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Program ini ditujukan untuk memfasilitasi anak-anak usia dini, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendidik anak-anak di Desa lain. Adapun masalah-masalah yang terdapat dalam program pembangunan gedung sekolah PAUD di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai adalah sebagai berikut:

- a. Belum digunakannya gedung sekolah PAUD.
- b. Proses kegiatan musyawarah pembangunan desa tidak dihadiri LPM dan masyarakat.
- c. Perencanaan pembangunan sekolah PAUD tidak melibatkan masyarakat yang ada di Dusun sehingga menyebabkan kurangnya peran aktif masyarakat untuk mengelola sekolah PAUD.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diperlukan penulis untuk memiliki arahan yang

jas dalam memecahkan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas maka penelitian ini memfokuskan pada proses perencanaan pembangunan fisik khususnya pembangunan sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada identifikasi permasalahan dan fokus penelitian yang telah diungkapkan diatas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: “Bagaimana perencanaan pembangunan sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya”.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya diajukan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai yaitu menganalisis proses perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan dan pemanfaatan gedung sekolah PAUD dengan menggunakan syarat perencanaan pembangunan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembangunan sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai

Deras yang pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan unsur pokok perencanaan pembangunan dalam memperhatikan tujuan akhir yang dikehendaki, badan pelaksanaannya, modal serta pengalokasiannya dan kebijakan untuk melaksanakannya.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan kajian keilmuan khususnya Administrasi Pembangunan, serta dapat dijadikan sumber bacaan/referensi ilmiah perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak untuk literatur penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi pemerintah Desa Sungai Deras penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui dan memperhitungkan unsur pokok program perencanaan pembangunan terkhusus pembangunan sekolah PAUD, serta dapat digunakan sebagai panduan untuk mengoptimalkan masyarakat dalam pembangunan di Desa.

- 2) Bagi lembaga dapat disajikan bahan referensi atau bahan bacaan bagi peneliti berikutnya.
- 3) Bagi masyarakat Dusun Pinang A manfaat penelitian ini sebagai salah satu faktor untuk mendorong masyarakat agar memahami arti pentingnya kemajuan suatu pembangunan didalam masyarakat itu sendiri.
- 4) Bagi mahasiswa kajian Administrasi Pembangunan, penelitian ini dapat menjelaskan tentang seberapa pentingnya perencanaan pembangunan di Desa dan dengan adanya pendukung dari pemerintahan desa dan masyarakat dalam mengelola pembangunan desa, serta dapat memperbaiki terhadap kurangnya perencanaan yang dibuat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Administrasi Pembangunan

Ginandjar Kartasasmita (Ngusmanto 2015, 42) administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini berarti bahwa

dalam studi dan praktik administrasi pembangunan diperlukan adanya perhatian dan komitmen terhadap nilai-nilai yang mendasari dan perlu diwujudkan menjadi dasar etika birokrasi.

Menurut Ngusmanto (2015, 51) administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu administrasi publik menurut Riggs (1994), Siagian (1983) dan Tjokroamidjojo (1997) memiliki 2 (dua) ruang lingkup yang penting yaitu: (1) Pembangunan administrasi (*the development of administration*) atau penyempurnaan administrasi negara (publik) dan (2) Administrasi Pembangunan (*the administration of development*) atau administrasi bagi pembangunan. Lebih lanjut Riggs (Ngusmanto 2015, 42) menegaskan bahwa administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi besar (pemerintah) untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna menemukan sasaran-sasaran pembangunan. Selain itu, istilah administrasi pembangunan dikaitkan dengan implikasinya,

termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan administratif.

Kedua ruang lingkup dari administrasi pembangunan yang terdiri dari pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan atau administrasi bagi pembangunan ini memerlukan dukungan dan atau kehadiran partisipasi masyarakat, oleh karena pentingnya kehadiran partisipasi masyarakat maka Tjokroamidjojo (Ngusmanto 2015, 52) menambah satu ruang lingkup dari administasi pembangunan yaitu pembangunan partisipasi masyarakat sebagai ruang lingkup yang ketiga. Kita menyadari bahwa kegiatan apa pun, termasuk pembangunan akan banyak terhambat dan bahkan akan mengalami kegagalan apabila tidak melibatkan partisipasi aktif dan positif atau kontribusi masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup Administrasi Pembangunan terdiri dari: a. *The administration of development* atau Administrasi Pembangunan b. *The development of administration* atau penyempurnaan atau Pembangunan Administrasi Negara c. Pembangunan Partisipasi Masyarakat.

b. Perencanaan

Menurut Ngusmanto (2015, 60) perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, efisien dan efektif untuk menetapkan pilihan atau skala prioritas tindakan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dengan memperhitungkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya. Menurut Afifudin (2014) perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara mencapai tujuan tersebut. T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dimana pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.

Menurut teori Handoko dalam Afifudin (2014) bahwa dalam membuat sesuatu perencanaan yang baik diperlukan adanya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, perencanaan harus dilakukan melalui 4 tahap sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan dengan memutuskan sasaran

yang ingin dicapai organisasi dan menetapkan prioritas dan memerinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif.

- 2) Merumuskan keadaan/posisi saat ini dengan mengetahui keadaan organisasi dan sumber daya yang dimiliki pada saat ini dalam tahap ini organisasi harus memberikan keterbukaan agar informasi mengalir dengan lancar, terutama data keuangan dan data statistik.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dengan mengetahui faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dan memilih alternatif yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

c. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan dengan jangka waktu tertentu. Ginanjar (Ngusmanto 2015, 62) menyatakan syarat perencanaan pembangunan yang baik pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok perencanaan yang terdiri dari:

- 1) Tujuan akhir yang dikehendaki
- 2) Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- 3) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
- 4) Orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan, pemerintah dapat merumuskan kegiatan

pembangunan yang secara efisien dan efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

2. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini dibuat peneliti dengan maksud untuk mempermudah dan memahami alur dari proses penelitian ini. Alur pikir penelitian ini adalah:

a. Judul

Proses Perencanaan
Pembangunan Fisik Di Desa Sungai
Deras Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu Raya

b. Masalah Penelitian:

- 1) Belum digunakannya gedung sekolah PAUD.
- 2) Proses kegiatan musyawarah pembangunan desa tidak dihadiri LPM dan masyarakat.
- 3) Perencanaan pembangunan sekolah PAUD tidak melibatkan masyarakat yang ada di Dusun sehingga menyebabkan kurangnya peran aktif masyarakat untuk mengelola sekolah PAUD.

c. Teori

Ginjar (Ngusmanto 2015,62)
menyatakan syarat perencanaan

pembangunan yang baik pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok perencanaan yang terdiri dari:

- 1) Tujuan akhir yang dikehendaki
- 2) Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- 3) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
- 4) Orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya.

d. Output

Terwujudnya perencanaan pembangunan sekolah PAUD di Desa Sungai Deras yang baik melalui musrenbang dengan mengetahui dan memperhitungkan syarat perencanaan pembangunan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara faktual, sistematis dan akurat tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan masalah perencanaan pembangunan sekolah PAUD.

Penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ini mengeksplor fenomena-fenomena sehingga mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan menggambarkan atau menjelaskan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data sehingga realita mengenai perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dapat terungkap sebagaimana yang diinginkan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan fokus yang akan diteliti, maka lokasi penelitian dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.. Waktu penelitian dilaksanakan pada September 2019 hingga Agustus 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah semua yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang dianggap paling tahu dan mengenal tentang seluk beluk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sekolah PAUD di Desa Sungai Deras. Menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan

pertimbangan dan tujuan tertentu. Mem peroleh data dan informasi dengan pertimbangan bahwa informan menguasai masalah dan banyak menyimpan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Maka yang menjadi subyek pada penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Sungai Deras
- b. Bendahara Desa Sungai Deras
- c. Kepala Dusun Pinang A
- d. Ketua BPD Desa Sungai Deras
- e. Masyarakat Desa Sungai Deras

Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan pembangunan sekolah PAUD di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan proses perencanaan pembangunan fisik khususnya pembangunan sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.

5. Instrument Atau Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data di lapangan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012: 338-345) yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum kata-kata yang penting, kemudian penyajian data (*data display*) dilakukan dengan kalimat yang singkat atau uraian yang singkat, dan yang terakhir verifikasi data (*conclusion drawing/ verification*) dengan menarik kesimpulan dari masing-masing data yang ada.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan tringulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

D. HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Akhir Yang Dikehendaki Dari Pembangunan Sekolah PAUD

Perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. RPJM-Desa dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran dan tujuan strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan. Tujuan akhir yang dikehendaki dari penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan membangun komitmen dan konsistensi antar para pemangku kepentingan untuk menentukan arah pembangunan desa kedepan dengan

tetap mengacu pada RPJM Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah desa sudah menjalankan apa yang di usulkan oleh masyarakat yaitu perencanaan pembangunan sekolah PAUD, namun pada perencanaan tujuan akhir yang dikehendaki atau diharapkan belum dapat berjalan seperti yang diinginkan karena hanya sebatas pembangunan gedung belum pada pengelolaan atau pemanfaatan gedung tersebut, hal ini disebabkan SDM yang ada di Dusun belum ada kemauan dan kemampuan untuk mengelola sekolah PAUD tersebut.

Tujuan perencanaan sangat berkaitan dengan cara mengimplementasikan sebuah perencanaan. Oleh karena itu, tujuan beserta rumusnya menjadi sangat penting terhadap bentuk kebijakan yang akan dihasilkan. Dalam perumusan tujuan terdapat kesulitan dalam proses perencanaan ini disebabkan tujuan perencanaan memiliki resiko masing-masing yang harus dipertimbangkan ketika menentukan pilihan yang terbaik.

Dilihat dari teori Ginanjar (Ngusmanto 2015,62) menyatakan syarat perencanaan pembangunan yang

baik pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok penelitian yang terdiri dari salah satunya yaitu: Tujuan akhir yang dikehendaki. Dengan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan dengan memutuskan sasaran yang ingin dicapai organisasi dan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif.

2. Modal Atau Sumber Daya Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan

Salah satu tugas manajemen pembangunan dalam kaitannya dengan anggaran adalah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar dana pembangunan digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah kebocoran. Perhatian utama diberikan pada pengalokasian anggaran pembangunan untuk membiayai kegiatan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa modal atau sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya belum direncanakan secara tuntas. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan sekolah PAUD hanya sebatas pembangunan gedung saja tidak sampai bagaimana mengelola dan memanfaatkan gedung tersebut hingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat desa. Jika dianalisis dengan menggunakan dari teori Ginanjar (Ngusmanto 2015,62) menyatakan bahwa syarat perencanaan pembangunan yang baik pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok perencanaan yang terdiri dari salah satunya yaitu: modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Sehingga pada perencanaan pembangunan sekolah PAUD seharusnya memerhatikan dan memperhitungkan modal dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya secara jelas agar pembangunan yang ada di desa tidak hanya sebatas bangunan gedung saja tetapi sampai pada apa yang diharapkan masyarakat yaitu adanya pembangunan sekolah PAUD yang dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat setempat. Oleh karena

itu, pentingnya perencanaan pembangunan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa agar dapat menentukan bagaimana memperbaiki keadaan saat dimasa yang akan datang. Pada teori Handoko dalam Afifudin (2014) bahwa dalam membuat suatu perencanaan diperlukan adanya tahapan yang perlu dilakukan salah satunya yaitu merumuskan keadaan/posisi saat ini dengan mengetahui keadaan organisasi dan sumber daya yang dimiliki pada saat ini dalam tahap ini organisasi harus memberikan keterbukaan agar informasi mengalir dengan lancar, terutama data keuangan dan data statistik.

3. Kebijakan-Kebijakan Untuk Melaksanakan Pembangunan Sekolah PAUD

Tugas penting manajemen pembangunan adalah membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi

kegiatan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan mendirikan masyarakat.

Hasil wawancara dapat dianalisis bahwa kebijakan untuk melaksanakan pembangunan hanya sebatas pada pembangunan gedung belum beserta pada kegiatan pemanfaatan gedung tersebut dikarenakan Kepala Dusun beserta RT/RW mengusulkan pembangunan gedung namun belum adanya aktivitas kegiatan sekolah PAUD seperti di dusun yang lain, sehingga untuk kebijakan pemanfaatan sekolah PAUD selanjutnya bagaimana masyarakat untuk semangat mengelola sekolah PAUD di dusun Pinang A seperti dusun yang lainnya..

Menurut Anggara (2016, 161) penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi Negara mencakup penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, penataan pegawai, penataan kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Kejelasan kebijaksanaan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan transparansi dan

keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatannya, termasuk dalam hal penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perumusan dan penentuan kebijaksanaan, penegakan disiplin masyarakat, penggunaan pungutan dana dari masyarakat dan pelayanan umum kepada masyarakat luas.

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa kurangnya perencanaan pembangunan dalam melibatkan peran masyarakat setempat, masyarakat tidak tau masalah pembangunan yang ada, tidak adanya kebijakan untuk melaksanakan pembangunan yang hingga saat ini belum berjalan. Jika dianalisis dengan menggunakan dari teori Ginanjar (Ngusmanto 2015,62) menyatakan bahwa syarat perencanaan pembangunan yang baik pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok perencanaan yang terdiri dari salah satunya yaitu: kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui peraturan serta kegiatan pembangunan pemerintah yang

diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat.

4. Orang, Organisasi, Atau Badan Pelaksanaan Pembangunan Sekolah PAUD

Kelemahan Negara berkembang dalam menyelenggarakan pembangunan terutama pada sumber daya manusia, pada kuantitas, tetapi pada umumnya terletak pada kualitasnya. Oleh karena itu, manajemen pembangunan bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan berupa tenaga kerja yang berkualitas. Langkah berikutnya dalam manajemen pembangunan adalah memobilisasi sumber daya yang diperlukan berupa sumber daya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sebelum melaksanakan suatu kegiatan perlu mengetahui perencanaan pembangunan yang baik dengan memerhatikan dan mengoptimalkan sumber daya dan

potensi yang ada pada suatu daerah yang ingin dibangun.

Hasil wawancara ketua BPD hanya mengetahui orang untuk mengelola perizinan gedung oleh orang yang ada di desa dan untuk tenaga pengajar mengharapkan orang yang ada di dusun. Untuk kelanjutannya yaitu melaksanakan kegiatannya belum ada dan tidak ada disikapi oleh pemerintah desa yang seharusnya pengurus yang telah direncanakan tersebut dirombak ulang karena tidak aktif dan perlunya dorongan agar tidak terjadi lemahnya pengelolaan pembangunan sekolah PAUD sehingga dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Tugas penting manajemen pembangunan adalah membimbing, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat sehingga berkembang konsep pemberdayaan masyarakat. Menurut Anggara (2016, 162) dibutuhkan peranan dan fungsi

pemerintah yang lebih besar untuk mengarahkan dan mendorong usaha pembangunan. Aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan administrasi pembangunan. Sekalipun demikian, semua upaya pemerintah tidak akan berarti tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Dusun sudah mengetahui orang atau badan pengelola sekolah PAUD, namun SDM yang ada di dusun belum memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah PAUD. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Dusun Pinang A Desa Sungai Deras masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yaitu pada musdus sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui dan paham mengenai siapa yang mengelola dan mengajar di sekolah PAUD. Namun, masyarakat mengakui adanya penyampaian atau tawaran mengenai yang mengajar di sekolah PAUD tersebut sebelum dibangun gedung tapi sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber jika dianalisis dengan menggunakan dari teori Ginanjar (Ngusmanto 2015,62) menyatakan bahwa syarat perencanaan pembangunan yang baik pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok perencanaan yang terdiri dari salah satunya yaitu: orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya.

Menurut Ngusmanto (2015,66) perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif bermakna bahwa proses penyusunan perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan seperti unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, perwakilan perempuan, LSM dan lainnya. Pelibatan mereka sebagai upaya untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan peran masyarakat sangat dibutuhkan mulai

dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dalam suatu pembangunan. Bukan hanya itu saja dalam melakukan pembangunan pemerintah desa harus tahu dan paham apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan berjalan sesuai harapan.

Penelitian ini akan menyampaikan bagaimana perlunya memerhatikan syarat perencanaan pembangunan yang baik pada perencanaan pembangunan sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras menggunakan unsur pokok perencanaan pembangunan melalui alur proses musrenbang di Desa Sungai Deras. Sangat diperlukannya perencanaan dikarenakan gedung sekolah PAUD yang sudah dibangun belum digunakan sebagaimana mestinya sehingga dalam perencanaan pembangunan menurut Ginanjar (Ngusmanto 2015,62) menyatakan syarat perencanaan pembangunan yang baik pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok perencanaan. Berikut kesimpulan yang dapat dijelaskan.

- a. Tujuan akhir yang dikehendaki dari Desa Sungai Deras masih terjadi tidak meratanya pembangunan desa karena terpusat di Dusun Pendamar. Beberapa faktor tidak meratanya pembangunan yaitu pertama kinerja pemerintah desa yang kurang memadai hal ini didukung dari daftar masalah pengurus yang kurang memahami tupoksi dan kinerja pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan yang tidak tepat disebabkan informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau perencanaan sejak awal yang tidak realistis sehingga tidak dapat terlaksana.
- b. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasian anggaran pembangunan sekolah PAUD pada perencanaan pembangunan sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras belum sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan, yaitu kurangnya perencanaan pembangunan yang memenuhi unsur pokok perencanaan yang baik dengan faktor pendukung kurangnya peran aktif masyarakat dan belum meratanya perencanaan RPJMD

sehingga adanya anggaran dana yang terbatas dari desa yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengelola sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras yang sudah dibangun tersebut.

c. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan pembangunan sekolah PAUD masih sebatas pada pembangun gedung sekolah PAUD saja belum sampai bagaimana agar pelaksanaan pembangunan sekolah PAUD dapat berjalan dan difungsikan sebagaimana mestinya yang diinginkan masyarakat desa.

d. Orang, organisasi, atau badan pelaksanaan dalam pembangunan sekolah PAUD di Desa Sungai Deras sangat rendah. Rendahnya pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam berkontribusi mendorong berjalannya sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah, jumlah penduduk yang sedikit dan tidak hadirnya masyarakat saat perencanaan pembangunan yaitu musrenbang maupun musdus hal ini membuat terhambatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan sekolah

PAUD. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pelaksanaan perencanaan di desa harus melibatkan peran aktif masyarakat hal ini demi mewujudkan tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus membuat perencanaan dalam mengoptimalkan peran aktif masyarakat untuk mengelola dan membentuk badan pelaksanaan pembangunan sekolah PAUD.

2. Saran

Saran penulis untuk Pemerintahan Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya mengenai perencanaan pembangunan sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras adalah:

a. Pada tahap tujuan yang dikehendaki perencanaan pemerintah desa perlu untuk mengoptimalkan pemerataan pembangunan yaitu dengan mengoptimalkan kinerja pemerintahan desa yang kurang memadai hal ini didukung dari pemahaman pemerintah desa mengenai tupoksi dalam penyusunan perencanaan yang tepat dari informasi yang lengkap, metodologi

- yang harus dikuasai, atau perencanaan awal yang realistis sehingga pembangunan desa dapat terlaksana.
- b. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasian anggaran pembangunan sekolah PAUD pada perencanaan pembangunan sekolah PAUD di Dusun Pinang A Desa Sungai Deras. Perlunya meningkatkan pendekatan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperhitungkan dan memahami sumber modal yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Diharapkan masyarakat memahami arti penting perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat sehingga dapat terwujudnya pembangunan sekolah PAUD yang telah direncanakan.
- c. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan pembangunan sekolah PAUD pada perencanaan pembangunan sebaiknya dituntaskan hingga pelaksanaannya dikarenakan pemerintah sudah mengetahui keadaan dusun yang tertinggal sehingga perlu membuat kebijakan sampai bagaimana pelaksanaannya

agar dapat menimbulkan rasa tanggungjawab dan memiliki oleh pihak pemerintah dan masyarakat.

- d. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan yaitu dengan mewajibkan unsur yang ada di Desa seperti Kepala Desa, BPD, LPM, Dusun, RT/RW, dan masyarakat hadir dalam kegiatan musrenbang. Hal ini diharapkan agar dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan keadaan dan keinginan masyarakat yang ada di desa maupun di dusun dan dapat menimbulkan rasa memiliki dan tanggungjawab dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan serta memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

F. REFERENSI

SUMBER BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifudin. 2014. *Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global*. Bandung: Pustaka Setia.

- Anggara, Sahya dan Ii Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handoko, T Hani. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFT.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan; Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M.Manulang. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press P.O.BOX 14, Bulaksumur. Yogyakarta.
- Moleong, lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian. P. Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Skripsi**
- Adhabibi. 2017. *Perencanaan Pembangunan di Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas (skripsi)*. Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Cindy, Kristiani. 2017. *Perencanaan Pembangunan di Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang (skripsi)*. Universitas Tanjungpura. Pontianak.